

## **Motif Politik Ekonomi dalam Rencana Pembangunan Kawasan Industri Sidayu**

Reza Mahardika

Email: [rezamahardika016@gmail.com](mailto:rezamahardika016@gmail.com)

### **ABSTRAK**

Penelitian ini adalah studi yang membahas tentang politik ekonomi dalam perencanaan pembangunan kawasan industri Gresik khususnya di Kecamatan Sidayu, menegaskan bahwa ruang bukanlah obyek pasif dan bersifat geografis. Hal ini dapat dilihat dalam inkonsistensi tata ruang yang ada di Perda Gresik No. 8 tahun 2011 yang menyatakan bahwa kecamatan Sidayu adalah kecamatan Minapolitan. Sedangkan dalam Rancangan Tata Ruang Kecamatan 2016, kecamatan tersebut akan menjadi Kawasan Industri Sidayu (KIS). Terjadinya inkonsistensi disebabkan karena adanya motif politik ekonomi dalam kebijakan pemerintah tersebut. Hingga pada akhirnya, menyatakan bahwa motif politik ekonomi dalam perencanaan pembangunan tersebut adalah untuk menyerap surplus kapital dan surplus tenaga kerja. Hal ini tidak terhindar dari peran Pemerintah sebagai pengendali, perencanaan, dan pemanfaatan suatu ruang. Pemerintah sebagai pemanfaat ruang membutuhkan suatu sumber ekonomi yang baru, dimana dapat menarik investasi masuk sekaligus untuk menciptakan suatu lapangan pekerjaan yang baru.

Kata Kunci : Politik Tata Ruang, Produksi Ruang, Spatio Temporal Fixes, Surplus Kapital, Surplus Tenaga Kerja, Motif Politik Ekonomi

### **ABSTRACT**

This Study is a study that discuss about economy politic in a construction plan of kawasan industri Gresik specially in Sidayu, affirmed that room is not a passive subject and have a geographical. This can be see from spatial incosistency in Perda Gresik No. 8 tahun 2011

## PENDAHULUAN

Pertambahan penduduk yang terjadi di kota-kota besar di Indonesia memiliki konsekuensi logis terhadap peningkatan kebutuhan ruang untuk bermukim. Menurut Sujarto, ada tiga strategi yang dapat dilakukan untuk mengatasi fenomena tersebut, yakni intensifikasi kota, ekstensifikasi kota, dan pembangunan kota baru (new town). Dari ketiga strategi ini, pembangunan kota baru dianggap sebagai strategi yang paling baik untuk memenuhi kebutuhan ruang kota karena sifatnya yang relatif mandiri dan mampu mengoptimalkan aktivitas bermukim bagi para penghuninya.<sup>1</sup>

Terletak tidak jauh dari Surabaya yang merupakan ibu kota Provinsi Jawa Timur, menjadikan Kabupaten Gresik terus tumbuh menjadi salah satu daerah penyangga. Ekonomi Kabupaten Gresik mendapat pertumbuhan yang sangat tinggi sebesar 6,15% jika dibandingkan dengan Kabupaten lain yang ada di Jawa Timur. Pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Gresik melambat, jika dilihat dari tahun sebelumnya yaitu sebesar 7,03%.

Konsekuensi yang terjadi kemudian adalah perubahan tata ruang. Perubahan tata ruang di Kabupaten Gresik memiliki karakteristik sebagai kota industri modern. Hal ini dilakukan sebagai bagian dari tuntutan ekonomi global. Lantas investasi menjadi kata kunci atas kemajuan suatu kota. Atau dengan kata lain, Pemerintah berikut kepentingan serta kemauan politiknya sebagai cara untuk memacu pertumbuhan dan sekaligus sebagai instrumen perubahan kota yang mengacu pada pembangunan global metropolitan.<sup>2</sup> Sebagaimana asumsi Harvey mengenai kerangka kerja logika kekuasaan dan kapitalis. Sang kapitalis akan terus-menerus berusaha mengakumulasi kapital dimanapun dan kapanpun guna meraih profit yang semakin banyak tanpa terinterupsi. Sementara, sang politisi, yang bekerja dalam kerangka logika kekuasaan teritorial, berusaha mengejar kelanggengan atau memperbesar kekuasaan. Sang kapitalis mengejar keuntungan individual dan hanya bertanggungjawab kepada lingkaran terdekat, sementara sang politisi mengejar keuntungan kolektif dan dibatasi ruang serta konstitusi Negara dan bertanggungjawab kepada warga negara, lebih sering ke kelompok elit, kelas, struktur kekerabatan atau kelompok sosial lainnya.

Ruang kota kemudian menjadi obyek dari penataan ruang. Ruang kemudian dipahami sebagai obyek politik yang tidak bebas dari kepentingan setiap aktornya. Aktor politik tata ruang terdiri dari kelompok kapitalis, pemerintah dan masyarakat. Relasi kuasa antar aktor dapat menentukan Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW). Jika kita mengatakan RTRW maka ada kaitan erat dengan ruang itu sendiri, bagaimana ruang di konstruksi dan diperebutkan berdasarkan kepentingan yang diinginkan aktor. Proses mengkonstruksi ruang ini erat kaitannya dengan relasi kuasa antar aktor yang berada dalam tarikan pendulum dan kontinuitas konflik kontestasi.<sup>3</sup>

Penelitian ini kemudian menjelaskan mengenai motif politik ekonomi dalam perencanaan pembangunan Kawasan Industri Sidayu (KIS) di Kecamatan Sidayu. Karena bagaimanapun, perencanaan pembangunan Industri pada salah satu kawasan Gresik Utara ini menunjukkan bahwa praktik penataan ruang di perkotaan berdampak pada peningkatan perekonomian Kabupaten Gresik. Dalam praktik penataan ruang kita tidak dapat

---

<sup>1</sup> Sujarto, D. "Perencanaan Kota Baru." *Bandung: Penerbit ITB*, 1995.

<sup>2</sup> Siti Aminah. "Konflik dan Kontestasi Penataan Ruang Kota Surabaya". *Pusat Kajian Sosiologi FISIP-UI*. 2015.

<sup>3</sup> Ibid

menghilangkan unsur politik yang ada di dalamnya. Bagaimana para aktor melakukan negosiasi guna penataan ruang sesuai kepentingannya.

Menurut RTRW dalam PERDA no 8 tahun 2011 kecamatan Sidayu diperuntukkan untuk menjadi kawasan minapolitan. Hal ini berbenturan dengan rencana pembangunan KIS di kecamatan sidayu oleh pemerintah. Dengan adanya perbedaan ini maka DPRD komisi C tidak menyetujui adanya pembangunan kawasan industri di Sidayu dan Gresik meminta eksekutif tidak melanjutkan proses perizinannya. Hal ini dimaksudkan agar pemanfaatan ruang di kecamatan Sidayu masih sesuai dengan RTRW yakni sebagai kawasan minapolitan. Akan tetapi berdasarkan data di BPPM (Badan Perizinan dan Penanaman Modal) Pemkab Gresik, KIG Sidayu saat ini sudah mengantongi Izin Lokasi dan Izin Pemanfaatan Ruang (IPR).

Kawasan Industri Gresik Sidayu berada di kawasan Desa Golokan, Purwodadi hingga wilayah Desa Tanggungan. Ada sekitar 200 hektare yang disiapkan untuk menyulap lahan tambak menjadi kawasan industri terpadu. Kawasan itu merupakan pengembangan dari KIG di Kecamatan Gresik dan Manyar. Meski, merujuk Peraturan Daerah (Perda) nomor 8 tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), kawasan KIG Sidayu itu merupakan kawasan minapolitan.

### **Spatio Temporal Fixes dalam Perencanaan Kawasan Industri Gresik di Sedayu**

Secara defisinional, Spatio temporal fixes merupakan metafora bagi suatu solusi terhadap krisis-krisis kapitalisme lewat penanggungan secara temporer dan ekspansi geografis. Produksi ruang, organisasi dan pembagian tenaga kerja yang sepenuhnya baru secara teritorial, pembukaan kompleks sumber daya baru dan lebih murah, pembukaan kawasan baru sebagai ruang akumulasi yang dinamis, dan penetrasi formasi sosial yang telah ada oleh relasi-relasi sosial dan pengaturan-pengaturan kelembagaan kapitalis, sehingga menjadi cara penting untuk menyerap surplus kapital dan tenaga kerja.

Ekspansi, reorganisasi, dan rekonstruksi geografis semacam ini seringkali mengancam nilai-nilai yang telah terfiksasi dalam ruang hanya saja belum terealisasi, sehingga kemudian menciptakan kontradiksi yang tak terhindarkan. Menurut Harvey, kontradiksi muncul ketika ruang-ruang secara dinamis yang terakumulasi kemudiann menghasilkan surplus dan berusaha menemukan cara penyerapan melalui ekspansi geografis. Meski spatio temporal fixes bisa dilihat dalam kerangka kewilayahan, namun relasi-relasi material dan sosial wilayah yang terbangun melalui proses molekuler.

Pengembangan kawasan Industri ke wilayah Gresik Utara merupakan bagian dari gerak kapital. Dalam artian, ketika sub bab sebelumnya menjelaskan bahwa perbandingan antara kepadatan pusat kota dengan tiga kecamatan di kawasan Gresik Utara, maka selisih dari kepadatan itu begitu tinggi. Lantas hal ini dimaknai bahwa Pemkab Gresik melalui RTRW Kabupaten Gresik yang tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 08 tahun 2011 telah disetujui Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Sebagaimana dalam RDTRK yang dibahas oleh Pemkab dan DPRD Gresik tersebut, kawasan Gresik Utara menjadi salah satu kawasan industri besar dan kecil, membuktikan bahwa Pemkab Gresik sedang menjalankan fungsinya sebagai aktor politik tata ruang dalam konteks pemanfaatan dan pengendalian.

Langkah Pemkab Gresik untuk melakukan pola pemanfaatan pada daerah yang memiliki tingkat kepadatan rendah, merupakan bagian dari motif pemerintah untuk memajukan daerahnya dan menghindari kritis. Logika pembukaan kompleks sumber daya

baru seperti Kawasan Industri Gresik di Kecamatan Sidayu adalah pembukaan kompleks sumber daya baru dan lebih murah. Praktis, hal ini tidak lepas dari harga tanah di pusat kota yang begitu menjulang, sedangkan di saat bersamaan ada daerah pinggiran yang menawarkan nilai jual murah. Lantas pembangunan infrastruktur menjadi solusi atas jarak sekalipun.

Jika Kawasan Industri Gresik di Kecamatan Sidayu dimaknai sebagai pembukaan kompleks sumber daya baru dan lebih murah, maka pembukaan kawasan baru itu sebagai ruang akumulasi yang dinamis, dan penetrasi formasi sosial yang telah ada oleh relasi-relasi sosial dan pengaturan-pengaturan kelembagaan kapitalis, sehingga menjadi cara penting untuk menyerap surplus kapital dan tenaga kerja. Sebagai kota Industri, magnet ekonomi Kabupaten Gresik begitu tinggi. Lantas jumlah pendatang baru pada tiap tahun terus naik. Meski saat bersamaan, jumlah pengangguran juga terus meningkat. Hal seperti ini, yang kemudian menjadi stimulan agar Pemkab Gresik menciptakan kompleks sumber daya baru untuk menyerap surplus tersebut.

Sedangkan indikator terhadap surplus kapital dilihat dari tren pertumbuhan ekonomi. Ketika sebuah kota mengalami tren signifikan dalam pertumbuhan ekonomi, pada derajat tertentu itu justru mengkhawatirkan. Volatilitas ekonomi terjadi ketika putaran kapital hanya di pusat kota. Sedangkan kepentingan kelompok kapitalis tidaklah sekedar berkompetisi pada pangsa pasar yang terbatas saja. Melainkan kelompok kapitalis juga memiliki kepentingan yang tidak ingin terhambat dalam mengoperasionalkan sirkuitnya.

Harvey menjelaskan bahwa sirkuit kapital terdiri dari sirkuit primer, sekunder dan tersier. Pertama, sirkuit primer terdiri dari ranah produksi dan konsumsi langsung. Kedua, sirkuit sekunder, terdiri dari ranah pembentukan kapital dan konsumsi tetap. Ketiga, sirkuit tersier yaitu ranah belanja-belanja sosial dan riset serta pengembangan. Praktis, sirkuit primer berlangsung biasanya di pusat kota. Sedangkan sirkuit sekunder, menjadi kapital tetap untuk produksi. Pada sirkuit ini, Kawasan Industri Gresik di Kecamatan Sidayu dikategorisasikan. Beberapa hal yang identik dengan sirkuit kapital sekunder adalah pabrik dan perlengkapan, kapasitas penghasil listrik, jaringan rel kereta api, pelabuhan dan sebagainya. Berikut juga penciptaan atas suatu dana konsumsi seperti hunian atau perumahan. Dalam derajat tertentu, dalam sirkuit sekunder ini, terdapat aset-aset investasi yang menempati suatu tempat yang dibangun untuk diproduksi dan dikonsumsi, seperti jaringan transportasi, bandara, pelabuhan, kawasan industri, rumah sakit, dan sekolah. Investasi ini menurut Harvey akan menyerap sejumlah besar kapital dan tenaga kerja, terutama ketika terjadi ekspansi geografis.

Sebagaimana mengenai asumsi penciptaan suatu ekonomi ruang, menurut Harvey, menjelaskan kemunculan proses akumulasi kapital. Pertukaran barang dan jasa, termasuk tenaga kerja, hampir selalu menimbulkan perubahan dalam lokasi yang menimbulkan gerak spasial saling bertemu sehingga menciptakan suatu geografi interaksi manusia yang khas. Industri seperti pabrik yang tersentralisasikan merupakan bagian dari itu semua. Jika tidak terjadi penciptaan suatu ekonomi ruang, maka selain terbatasnya ruang kota yang menimbulkan banyak problematika, sebenarnya juga akan menjadikan kompetisi dalam sistem kapitalis yang begitu ketat, Kelompok Kapitalis kemudian cenderung mengejar keuntungan kompetitif dengan memanfaatkan struktur spasial dan cenderung terdorong dan bergerak ke lokasi dimana biayanya rendah atau labanya tinggi. Hal ini juga tidak lepas dari pola pengembangan kawasan Industri di Kecamatan Sidayu.

Kabupaten Gresik yang memiliki letak geografis bersebelahan dengan Surabaya yang merupakan ibukota Provinsi Jawa Timur, menjadikannya sebagai daerah penyangga. Ditinjau berdasarkan posisi relatif Gresik terhadap Jawa Timur, pertumbuhan ekonomi Gresik di atas

ekonomi Jawa Timur yang mengalami pertumbuhan 5,44% pada tahun 2015 atau melambat 0,42 poin dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya sebesar 5,86%.

Praktis, kondisi sebagai kota penyangga atau buffer city memiliki keuntungan strategis. Sub urbanisasi, atau gerak kapital di Ibukota Provinsi, sedikit banyak juga mempengaruhi arus kapital di Kabupaten Gresik. Jika logika yang dipakai oleh Kelompok kapitalis adalah membuka ruang baru, dengan biaya rendah dan keuntungan tinggi, maka tidak bisa dilepaskan dari persoalan gaji dan nilai beli lahan sebagai bagian dari modal yang harus dikeluarkan.

Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) di Jawa Timur Tahun 2017 sudah ditandatangani Gubernur Jatim. UMK tertinggi adalah Surabaya sebesar Rp 3.296.212,50. Sedangkan Kab Gresik Rp. 3.293.506,25. Perbedaan tipis ini memang cenderung tidak mendorong kelompok kapitalis kota Surabaya untuk melakukan gerak ekspansi kapital ke kawasan Industri Gresik di Sidayu. Meski pada saat bersamaan, potensi pelabuhan yang akan dibangun menjadi nilai tertentu dalam perhitungan kelompok kapitalis.

### **Produksi Ruang dalam Perencanaan Kawasan Industri Gresik di Kecamatan Sidayu**

Sekilas, memang perencanaan Kawasan Industri Gresik di Kecamatan Sidayu adalah bagian dari upaya untuk memproduksi ruang demi kepentingan ekonomi politik. Penelitian ini sekali lagi menegaskan bahwa tidak ada ruang yang sepenuhnya ideal karena ruang itu sendiri secara spasial dalam masyarakat kapitalis modern merupakan arena pertarungan yang tidak akan pernah selesai diperebutkan.<sup>4</sup> Setiap aktor dalam penataan tata ruang akan selalu berusaha merebut dominasi atas pemakaian dan pemanfaatan tata ruang. Menurut Ellen, korporasi mereproduksi segala pengetahuan untuk mempertahankan hegemoni mereka atas pemanfaatan ruang. Lantas ruang bersama terkonfigurasi untuk menjamin relasi antara produksi dan reproduksi.

Khusus untuk kawasan industri Gresik di Kecamatan Sidayu memang belum terlaksana pembangunannya. Meskipun sudah dalam konteks perencanaan. Apapun yang terjadi, pola produksi dan reproduksi merupakan bagian dari survive of kapitalisme. Produksi ruang secara spasial erat kaitannya dengan produksi ruang sosial. Hal ini menurut Lefebvre sebagai relasi antara korporasi dengan masyarakat. Dalam istilah inilah produksi ruang secara spasial akan mempengaruhi mentalitas masyarakat. Oleh karena itu, Lefebvre menganjurkan untuk memahami ruang dalam kaitannya dengan sejarah dan konteks secara spesifik.<sup>5</sup>

Space is real in the same sense that commodities are real since (social) space is a social product. Berangkat dari pernyataan Lefebvre tersebut, maka konstruksi atas ruang merupakan inti dalam perkembangan kapitalisme. Ruang di era kontemporer, selalu mewujudkan kehendak untuk menampilkan diri, a desire of self exhibition. Ruang merupakan komoditas yang memiliki nilai. Lefebvre (2000) mengungkapkan bahwa kapitalisme modern telah menjadikan ruang sebagai locus of production, sekaligus cara untuk mengartikulasikan komoditas yang akan terus berkembang. Kaitan antara ruang dan hegemoni pengetahuan menurut Lefebvre begitu menonjol. Hegemoni pengetahuan terus diproduksi dan menguatkan konsep kota hanya sebagai obyek, dengan basis netralitas ilmu pengetahuan dan mengabaikan konteks sejarah sosial perkembangan masyarakat yang menghidupkan ruang itu. Oleh sebab

---

<sup>4</sup> Arie Setyaningrum. "Produksi Ruang dan Revolusi Kaum Urban Menurut Henry Lefebvre." Diakses di <http://indoprogress.com/2016/01/produksi-ruang-dan-revolusi-kaum-urban-menurut-henri-lefebvre/pada-tanggal-15/01/2018>

<sup>5</sup> Ibid

itu, Lefebvre menekankan bahwa produksi ruang sosial sebagai basis ideologis dalam arena reproduksi pengetahuan mengenai suatu kota.

Asumsi Levebre diatas membantu untuk menjelaskan bahwa ruang tidak terlepas dari kepentingan. Pemkab Gresik juga memiliki kebutuhan terhadap kelompok kapital. Hal ini dibutuhkan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, dan kemajuan suatu kota. Daya tarik ekonomi suatu kota, tentu mempengaruhi seberapa besar investasi yang akan ditanamkan. Perencanaan tata ruang kemudian menjadi pintu masuk untuk melihat bagaimana relasi antara pemerintah, kelompok kapitalis dan masyarakat. Ruang kemudian dipahami sebagai produk politik yang mengakibatkan praktik tata ruang tidak pernah bebas dari keberpihakan aktor yang membuat regulasi tata ruang .

### **Motif Ekonomi Politik sebagai Faktor Perubahan Minapolis menjadi Kawasan Industri**

Perencanaan Kawasan Industri Gresik di Kecamatan Sidayu adalah bagian dari perubahan fungsi ruang. Dari minapolitan menjadi kawasan industri, seperti pergudangan, pabrik dan infrastruktur penunjang pelabuhan lainnya. Hal ini tidak terlepas dari motif politik ekonomi. Pada umumnya, sikap pemerintah yang tidak netral atau berpihak kepada kapitalis merupakan suatu kebutuhan dari pemerintah untuk merangkul kapitalis, selain kapitalis juga membutuhkan pemerintah termasuk dukungan dan kemauan politiknya untuk mengoperasikan sirkuit kedua kapitalnya maupun sirkuit pertamanya yaitu berupa pembangunan industri (manufaktur) dan perdagangan.

Penelitian ini kemudian menyimpulkan bahwa motif politik ekonomi dalam perencanaan kawasan Industri Gresik di Kecamatan Sidayu terdiri dari beberapa hal. Pertama, motif politik ekonomi dalam perencanaan pembangunan tersebut adalah untuk menyerap surplus capital dan surplus tenaga kerja. Surplus kapital di Gresik dipicu karena lokasi strategis Kabupaten tersebut dengan Ibukota Propinsi yakni Surabaya. Pertumbuhan ekonomi kemudian menjadi indikator, bahwa Kabupaten Gresik tumbuh menjadi kota penyangga, dengan geliat investasi dan industri yang signifikan. Pertumbuhan ekonomi ini menjadi tren positif, meski pada derajat tertentu membutuhkan sumber daya baru untuk mengoperasionalkan sirkuit kapital.

Kepentingan kelompok kapitalis adalah mengoperasionalkan sirkuit kapital tanpa hambatan. Sebagaimana Pemkab Gresik memiliki kepentingan untuk menjaga tren positif tersebut, berikut motif politik untuk kesejahteraan, mengentaskan kemiskinan, dan pemerataan. Untuk hal ini, dengan instrument kebijakannya, Pemkab Gresik memainkan perannya sebagai actor penataan ruang. Otoritas tersebut terdiri dari pengendalian, pemanfaatan dan perencanaan.

Pemkab Gresik sebagai mana dalam Dokumen RDTRK Gresik Utara 2010–2030 tersebut telah disepakati pada akhir tahun 2016. RDTRK ini mengacu pada RTRW Kabupaten Gresik yang tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 08 tahun 2011 telah disetujui Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Sebagaimana dalam RDTRK yang dibahas oleh Pemkab dan DPRD Gresik tersebut, kawasan Gresik Utara menjadi salah satu kawasan industri besar dan kecil. Dalam RDTRK Gresik Utara 2010–2030, ada tiga wilayah yang masuk dalam perencanaan itu, salah satunya adalah kecamatan Sidayu. Dari hal tersebut dapat dimaknai bahwa Pemkab Gresik menjalankan juga fungsinya untuk pengendalian dan pemanfaatan ruang.

Pengendalian ruang dalam konteks ini adalah mengurai kepadatan kota. Kecamatan Sidayu sebagai kecamatan dengan tingkat kepadatan terendah nomor tiga. Inilah kemudian

yang menjadi argumentasi mengenai pemanfaatan ruang. Sedangkan pengendalian ruang Gresik, ditinjau dari kepadatan pusat kota karena tumbuhnya industri besar kecil yang menjamur di tengah kota, khususnya di kecamatan Gresik. Selisih kepadatan di kecamatan tersebut dengan Kecamatan Sidayu begitu kontras.

Motif politik ekonomi kemudian adalah menyerap surplus tenaga kerja. Terjadi surplus tenaga kerja karena Gresik tumbuh menjadi magnet ekonomi. Hal ini dibuktikan dengan UMK Kabupaten Gresik tertinggi kedua setelah kota Surabaya. Hal ini kemudian mendorong penduduk pendatang, dan serbuan tenaga kerja. Untuk hal ini, Pemkab Gresik berkepentingan untuk mengurangi pengangguran dan agar tidak terjadinya krisis.

Krisis dalam konteks ini tidak hanya sekedar kemacetan. Lebih jauh krisis dalam hal ini ketika Kelompok kapitalis tidak lagi mampu mengoperasionalkan sirkuit kapitanya. Hal ini dikarenakan sumber daya terbatas, pangsa pasar terbatas, lantas kompetisi yang sifatnya global begitu mencuat. Lantas persaingan berdarah-darah ini tentu mendorong terjadinya volatilitas ekonomi.

Besaran kepentingan politik ekonomi terhadap perencanaan di kecamatan Sidayu ini mendorong konflik, kontestasi dan negosiasi. Hal ini dibuktikan dengan inkonsistensi antara RTRW dan RTDR. Dalam RTRW ditekankan bahwa Kecamatan Sidayu merupakan kawasan industri minapolitan. Sedangkan secara RTDR, Kecamatan Sidayu akan menjadi kawasan industri Gresik baik industri itu besar atau kecil. Hal ini tidak terlepas dari perencanaan infrastruktur seperti pelabuhan dan jalan arteri yang akan dibangun melewati kecamatan tersebut.

## **Kesimpulan**

Politik Ekonomi dalam perencanaan Kawasan Industri Gresik khususnya di Kecamatan Sidayu semakin meyakinkan bahwa ruang bukanlah obyek pasif dan bersifat geografis. Ruang menegaskan dirinya bahwa ia adalah obyek aktif dan bersifat politis. Hal ini kemudian melahirkan konflik, kontestasi dan negosiasi antar aktor politik. Masyarakat, Kelompok kapitalis dan pemerintah merupakan aktor politik tata ruang. Dalam Negosiasi antara kelompok kapitalis dengan pemerintah, menghasilkan suatu perubahan arah penataan ruang di Kabupaten Gresik sendiri. Menurut RDTRK yang baru menjelaskan bahwa Kecamatan Sidayu akan dibuat menjadi Kawasan Industri, di mana betolak belakang dengan RTRW Kabupaten Gresik.

Motif politik ekonomi dalam perencanaan kawasan Industri Gresik di Kecamatan Sidayu terdiri dari beberapa hal. Pertama, motif politik ekonomi dalam perencanaan pembangunan tersebut adalah untuk menyerap surplus capital dan surplus tenaga kerja. Surplus kapital di Gresik dipicu karena lokasi strategis Kabupaten tersebut dengan Ibukota Provinsi yakni Surabaya. Pertumbuhan ekonomi kemudian menjadi indikator, bahwa kota Gresik tumbuh menjadi kota penyangga, dengan geliat investasi dan industri yang signifikan. Pertumbuhan ekonomi ini menjadi tren positif, meski pada derajat tertentu membutuhkan sumber daya baru untuk mengoperasionalkan sirkuit kapital. Motif politik ekonomi bertujuan menyerap surplus tenaga kerja. Terjadi surplus tenaga kerja karena Gresik tumbuh menjadi magnet ekonomi. Hal ini dibuktikan dengan UMK Kabupaten Gresik tertinggi kedua setelah kota Surabaya. Hal ini kemudian mendorong penduduk pendatang, dan serbuan tenaga kerja. Untuk hal ini, Pemkab Gresik berkepentingan untuk mengurangi pengangguran dan agar tidak terjadinya krisis. Krisis dalam konteks ini tidak hanya sekedar kemacetan. Lebih jauh krisis dalam hal ini ketika Kelompok kapitalis tidak lagi mampu mengoperasionalkan sirkuit kapitanya. Hal ini dikarenakan sumber daya terbatas, pangsa

pasar terbatas, lantas kompetisi yang sifatnya global begitu mencuat. Lantas persaingan berdarah-darah ini tentu mendorong terjadinya volatilitas ekonomi.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

David Harvey. "Between Space and Time: Reflections on the Geographical Imagination." *Annals of the Association of American Geographers* 80.3 (1990): 418-434.

David Harvey. 1985. *The Urbanization of Capital: Studies in the History and Theory of Capitalist Urbanization*. Oxford UK: Blackwell.

Sujarto, D. "Perencanaan Kota Baru." Bandung: Penerbit ITB, 1995.

Siti Aminah. "Konflik dan Kontestasi Penataan Ruang Kota Surabaya". *Pusat Kajian Sosiologi FISIP-UI*. 2015.

Jurnal Arie Setyaningrum (2016), *Produksi Ruang dan Revolusi Kaum Urban Menurut Henry Lefebvre*